

**ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

Oleh:

DELITA FEBRIARANTI
NIM. 17108010011

DOSEN PEMBIMBING

ACHMAD NURDANY, S.E.I., S.E., M.E.K
NIP. 19900525 00000 1 301

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-778/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DELITA FEBRIARIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17108010011
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K.
SIGNED

Valid ID: 6123063e55a3b



Penguji I

Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 611f4f6866fb5



Penguji II

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 611dc8e6aa427



Yogyakarta, 10 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 612325047feb5

SURAT PENYERTAAN KEASLIAN

SURAT PENYERTAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delita Febriarianti

NIM : 17108010011

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya pemnyimoangan dalam karya ini, maka tanaggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyaataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Penyusun,



Delita Febriarianti
NIM. 17108010011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Delita Febriarianti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Delita Febriarianti

NIM : 17108010011

Judul Skripsi : **“Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Pembimbing



Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K
NIP. 19900525 00000 1 301

ABSTRACT

Regional financial management government was now change decentralized in carrying out the regional autonomy tasks. Regional financial management all manage regional finance in accordance with the laws and regulation effect. This study aims to analyze the factor that influence capital expenditure with economic growth as a moderating study for district or city government in Java in the 2015-2019 period. The research was conducted with quantitative methods using secondary data. The analysis technique used was panel data with the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The purpose of using method was to explain the effect of moderating variables to strengthen or weaken the relationship between the independent variable and the dependent variable. The variables used in the study were capital expenditure, general allocation funds (DAU), local revenue (PAD), and economic growth. Based on the results of the regression test, the relationship of economic growth as a moderator was able to weaken the DAU on capital expenditure. Meanwhile, the economic growth was able to strengthen PAD on capital expenditure. This study recommended that local governments remain focused on increasing their regional fiscal independence. It would create social welfare which means that the better quality of human resources will have an impact on increasing local revenue sources and will be able to contribute to capital expenditure. The central government with different levels of economic growth independence certainly needed fair share of the allocation of transfer to regions according to the financial condition of each region.

Keywords: *Regional Finance, DAU, PAD, Economic Growth, and Local Govern*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintahan telah berubah menjadi desentralisasi dalam pelaksanaan tugas otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya dikelola dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di pulau Jawa pada periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah data panel dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Tujuan menggunakan metode ini untuk menjelaskan pengaruh variabel moderasi memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi dapat memperlemah DAU terhadap belanja modal. Hubungan pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat PAD terhadap belanja modal. penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah tetap fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini akan menciptakan kesejahteraan masyarakat artinya kualitas sumber daya manusia lebih baik akan berdampak pada sumber penerimaan asli daerah semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi terhadap belanja modal. Pemerintah pusat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda tentunya perlu porsi transfer daerah secara adil disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Pergilah ke jalanmu, bahkan
jika kamu hidup dalam sehari.
Lakukan sesuatu dan singkirkan
kelemahannya"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Untuk kedua orang tua saya, Bapak Zainudin dan Ibu Susianti yang jasa serta kasih sayangnya yang tidak terhitung dan selalu mendukung serta mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.Sc.Fin., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. DRS. Slamet Khilmi, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
5. Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dalam menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Zainudin dan Ibu Susianti, serta Adik Novena Dwi Jayanti sebagai sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis serta

memberikan doa yang tulus dan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman INFEST angkatan 2017 Ekonomi Syariah yang senantiasa berjuang bersama penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Kepada sahabat terbaik Siti Nur Laela, Putri Lathifah Az-Zahra yang menjadi teman mengerjakan tugas, teman berbagi masalah teman main dan nongkrong, teman jalan serta teman yang selalu ada selama berada di Yogyakarta.
10. Kepada teman baik, Muhammad Mustaqim Al Fikri, Nadia, Ade Surya Sukma, serta Mubasysyratul Ummah S, Utami Suhariningsih, yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.
11. Serta seluruh keluarga besar KOPMA UIN (Koperasi Mahasiswa) yang telah membimbing penulis selama berada di kampus.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan kebermanfaatan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan dipermudah semua urusannya oleh gusti Allah SWT serta semoga skripsi ini juga dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembaca, Aamiin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2021

Penulis,



Delita Febriarianti
NIM. 17108010011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PENYERTAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Keuangan Publik	12
2. Keuangan Daerah	15
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	20
4. Keuangan Negara atau Daerah dalam Prespektif Islam	23
B. Telaah Pustaka	28
C. Pengembangan Hipotesis	35
D. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Metode Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	41
C. Definisi Operasional Variabel.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis Data Penelitian	51
1. Analisis Deskriptif.....	51
2. Analisis Regresi Data Panel	53
a. Uji Spesifikasi Model	53
b. Hasil Regresi Data Panel dan Interpretasi.....	56
c. <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dan Interpretasinya.....	59
B. Pembahasan.....	61
C. Keuangan Publik dalam Prespektif Islam	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	xvi
Lampiran 1 Data APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.....	xvi
Lampiran 2 Analisis Deskriptif.....	xxii
Lampiran 3 Hasil Regresi dan Uji Model, DAU, PAD terhadap Belanja Modal ..	xxii
Lampiran 4 Hasil Regresi dan Uji Model Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada DAU, PAD terhadap Belanja Modal (Estimasi 2).....	xxviii
<i>Curriculum Vitae</i>	xxxv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.2 Uji Spesifikasi Model Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	53
Tabel 4.3 Uji Spesifikasi Model Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	55
Tabel 4.4 Regresi Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	57
Tabel 4.5 Regresi Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	58
Tabel 4.6 Regresi Estimasi Kedua Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada DAU dan PAD terhadap Belanja Modal	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Pemerintah Provinsi Secara Nasional.....	4
Gambar 1.2 Grafik rata-Rata Pendapatan Pemerintah Daerah Menurut Provinsi Periode 2019-2020	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Realisasi APBD (Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah), Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.....	xvi
Lampiran 2 Hasil Deskriptif.....	xxii
Lampiran 3 Hasil Regresi, Uji Model DAU dan PAD terhadap Belanja Modal	xxii
Lampiran 4 Hasil Regresi, Uji Model Pendaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada DAU dan PAD terhadap Belanja Modal	xxviii
<i>Curriculum Vitae</i>	xxxv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut akan mempengaruhi prinsip pengelolaan, mekanisme penyusunan dan penataan serta pertanggung jawaban keuangan daerah. Tolak ukur keberhasilan otonomi daerah yaitu dengan melihat hasil belanja daerah baik belanja daerah secara langsung maupun belanja daerah secara tidak langsung. Pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penambahan aset tetap pada daerah. APBD menjadi cerminan dari manajemen keuangan daerah dalam melaksanakan alokasi sumber daya daerah secara optimal dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan yang tepat guna. APBD mencakup item-item untuk menyalurkan anggaran APBD salah satunya yaitu investasi (belanja modal) yang berfungsi untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu tahun.

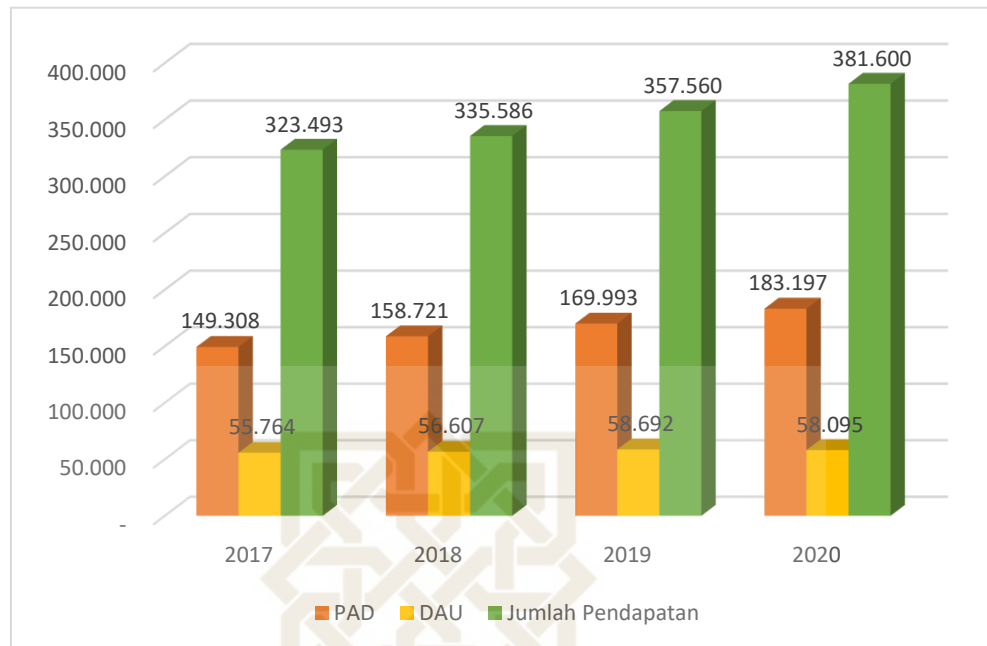
Pentingnya pengelolaan APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi masyarakat, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan guna memonitorin visi dan misi program kerja Presiden Republik Indonesia. Pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi jumlah kemiskinan. Dalam hal

ini pemerintah memastikan mendukung segala sarana dan prasarana yang memadai dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, menyediakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, serta reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa saat ini alokasi APBD lebih diprioritaskan untuk belanja modal pegawai yang jumlahnya sangat besar. Alokasi APBD seharusnya memprioritaskan pada belanja modal yang merupakan komponen untuk menghasilkan aset tetap.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelokasikan belanja modal dengan baik dikarenakan belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal sendiri memiliki peran penting karena memiliki manfaat jangka panjang dalam memberikan pelayanan kepada publik. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Namun, disisi lain masing-masing daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam penerimaan pajak yang berbeda. Ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam dan penerimaan pajak yang besar. Sedangkan, di beberapa daerah masih mengalami kesulitan sumber daya alam dan penerimaan pajak yang terbatas. Dalam upaya penanggulangan kesenjangan antar daerah, maka peran pemerintah pusat untuk mendorong keuangan daerah mengalokasikan dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Demikian pula belanja modal pada wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pada dasarnya setiap wilayah di pulau Jawa memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Kondisi ini juga didukung oleh potensi daerah yang perkembangannya juga tidak jauh berbeda. Fenomena yang terjadi yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada setiap wilayah di pulau Jawa selama tiga tahun berturut-turut, tentunya juga akan diikuti oleh meningkatnya belanja modal. Pembiayaan belanja daerah tersebut memerlukan sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Keberadaan PAD memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Ukuran PAD menentukan besarnya belanja modal, lebih menggali potensi daerah atau sumber daya alamnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya. Dana perimbangan merupakan dana transfer ke daerah diperuntukkan mengurangi ketimpangan pendanaan keuangan antar daerah. Dana transfer kedaerah diharapkan menjadi stimulus kekurangan daerah yang kurang sumber daya alam dan penerimaan pajak, serta mampu mendorong perekonomian di daerah-daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. Setiap kabupaten atau kota memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Hal ini karena pendapatan fiskal setiap daerah berbeda-beda sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah.

Gambar 1.1: Grafik Penpadatan Pemerintah Provinsi Secara Nasional



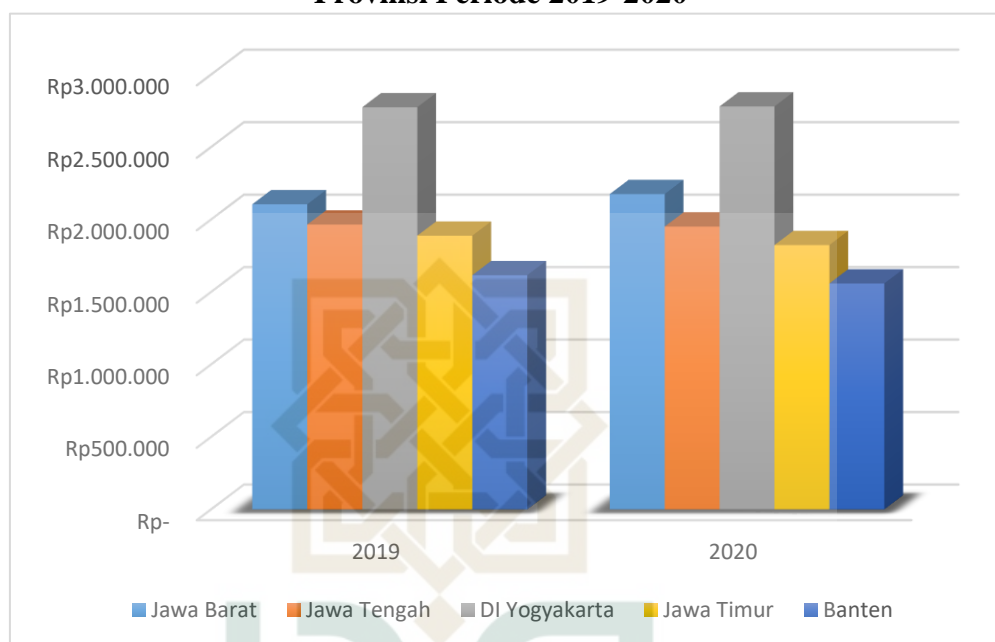
Sumber: Publikasi BPS 2020, telah diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting di daerah. Keberhasilan peningkatan PAD menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut telah mampu memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Dapat dilihat pada Gambar 1 selama periode tahun 2017-2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, begitu juga Dana Alokasi Umum yang juga ikut meningkat pada periode 2017-2019. Sedangkan pada periode 2020 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan.

Besar kecilnya belanja modal juga bergantung pada luas wilayah, dikarenakan realisasi belanja modal pengeluaran untuk kepentingan umum cenderung memandang fisik disuatu daerah (Adisasmita, 2018). Ketika suatu kabupaten ingin melakukan pemekaran wilayah yang terdapat konflik antar daerah dan pusat maka daerah mengalami kecemburuan sosial di pusat karena aloksi dan

distribusi pendapatan dikembalikan dari pinus ke daerah tersebut dianggap tidak adil.

Gambar 1.2: Grafik Rata-Rata Pendapatan Pemerintah Daerah Menurut Provinsi Periode 2019-2020



Sumber: Publikasi BPS 2020, telah diolah

Berdasarkan pada Gambar 2 membuktikan bahwa pendapatan suatu provinsi memiliki perbandingan yang tidak terlalu signifikan. Dimana dalam gambar terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan pada pendapatan pemerintah periode 2019-2020 yaitu, pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan pada provinsi Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan namun tidak cukup signifikan dari periode 2019 ke 2020. Penurunan pendapatan pemerintah pada provinsi di sebabkan juga karena adanya wabah virus COVID-19 yang tengah melanda Indonesia sejak tahun 2019. Hal tersebut di karenakan adanya peraturan pemerintah dimana seluruh objek pariwisata di Indonesia ditutup sampai wabah COVID-19 mereda.

Kemandirian anggaran pendapatan dan belanja daerah erat kaitannya dengan kemandirian pendapatan asli daerah. Karena, semakin besar sumber bantuan, maka semakin fleksibel daerah untuk menyesuaikan diri dengan kepentingannya. Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah juga terkait dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut George H. Bort (1960) dalam teori ekonomi *Neoklasik* dimana kemampuan wilayah peningkatan kegiatan produksinya ditentukan oleh potensi suatu wilayah daerah, mobilitas tenaga kerja serta mobilitas antar daerah (Adisasmita, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter kegiatan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur laju sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai kondisi kegiatan ekonomi yang menyebabkan produksi barang dan jasa meningkat untuk kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah agar perekonomian dapat tumbuh setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat bersumber dari peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat akan mendorong masyarakat dalam pembayaran retribusi pada pemerintah. Besar kecilnya suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sedang berkembang. Semakin banyak daerah yang didukung oleh peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat.

Pada penelitian sebelumnya oleh Saraswati (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara” yang dimana hasil dari penelitian ini adalah PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara. Sedangkan pada Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Jaeni (2016) yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal” penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan model *quasi moderating*. Penelitian ini menghasilkan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, begitu juga pada variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal dan terbukti dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan beberapa pendahulu menunjukkan bahwa beberapa penelitian yang dilakukan masih terdapat ketidak konsistenan hasil yang diperoleh sehingga menimbulkan *research gap*. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan pengujian ulang untuk melihat seberapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengaruh terhadap pemerintahan. Oleh karena itu maka penulis akan melakukan penelitian dengan berjudul: **“Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian penulis akan berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi terhadap Belanja Modal (BM) pemerintah daerah di pulau Jawa. Analisis ini dilakukan selama tahun 2015-2019. pertanyaan penelitian berikut dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa Tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa Tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan melakukan penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Tujuan yang dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa tahun 2015-2019?
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa tahun 2015-2019?

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi dalam memoderasi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten atau kota di pulau Jawa tahun 2015-2019?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan mengoptimalkan peran mahasiswa sebagai sarana pengetahuan lebih jauh variable-variabel yang mempengaruhi belanja modal.
2. Bagi akademisi, penelitian ini untuk memberikan wadah kepada para akademisi untuk lebih mengembangkan dari penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai ilmu baru dibidang keilmuan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini untuk memberikan informasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang akan diambil dalam pengalokasian anggaran APBD.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pembahasan dari gambaran alur pemikiran yang disusun saling berkaitan secara keseluruhan. Berikut sistematika pembahasa yang terdiri dari lima bagian diantaranya:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai penjelasan topik yang akan diteliti. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yaitu menguraikan hal-hal yang mendasari mengenai topik pada penelitian ini. Gambaran tersebut didukung dengan

mengembangkan isu-isu terbaru, data-data, teori, dan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini. Setelah permasalahan diuraikan di bagian latar belakang, maka disusun sebuah rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian ini yang perlu dicari jawabannya. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari hal-hal yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini.

Bab II landasan teori, membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Diantaranya definisi, konsep, serta teori-teori yang mendasar pada setiap variabel yang digunakan. Disesuaikan dengan sumber-sumber referensi yang relevan dan mencantumkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, disusun pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran sebagai landasan dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, bagian ini menjelaskan mengenai variabel penelitian yang digunakan, objek penelitian seperti jenis penelitian, sumber, jenis data dan teknik analisis data yang digunakan. Menguraikan populasi dan sampel penelitian, serta memaparkan definisi operasional pada masing-masing variabel.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari olah data dan menginterpretasikan hasil tersebut dalam analisis deskriptif. Hasil analisis diperkuat dengan argumentasi penjelasan yang logis sesuai dengan konsep teoritis.

Bab V kesimpulan, pada bab ini menjelaskan hasil keseluruhan dari penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan dinarasikan sesuai hasil penelitian. Penulis juga mencantumkan saran bagi pihak-pihak yang

terkait dalam penelitian ini. Peneliti juga memberikan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai analisis determinan belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi studi pada pemerintah kabupaten atau kota di pulau Jawa tahun 2015-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah baik namun hal ini tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian DAU terhadap belanja modal. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan keagenan pemerintah eksekutif dan legislatif, dimana sebelum penyusunan APBD terlebih dahulu dibuatnya suatu kesepakatan antar mereka tentang kebijakan anggaran yang akan menjadi pedoman penyusunan APBD. Kemudian kalangan eksekutif terjadinya pengamanan pada posisi masing-masing dalam pemerintahan dan masyarakat.
2. Pengaruh hubungan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap belanja modal. Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa berhasil mengoptimalkan dan mengelola pendapatan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari besaran pendapatan asli daerah yang dihasilkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Belanja modal yang

semakin maksimum juga yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan fasilitas umum dengan meningkatnya sarana prasarana melalui pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi DAU dan PAD terhadap belanja modal secara simultan. Pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu daerah juga akan memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja daerah termasuk pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi pada daerah itu meningkat maka akan meningkatkan juga pendapatan perkapita, daya beli dan produksi barang dan jasa pada daerah tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dikarenakan daerah tersebut dianggap mampu dalam mengalokasi keuangan daerahnya, dan tentunya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap pengalokasian sumber-sumber daya yang juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dimana masyarakat akan semakin rajin dalam membayar pajak ataupun retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan membuat peran belanja modal dalam perbaikan atau pembuatan infrastruktur yang semakin membaik.

B. Saran

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan kembali oleh pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait hal anggaran keuangan. Pemerintah daerah harus selalu berjuang untuk mencapai daerah yang mandiri dan tidak memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat. Dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah perlu memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah untuk menunjang PAD lebih besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat tinggi sehingga menciptakan potensi dari PAD terhadap kesadaran membayar pajak. Permasalahan yang sering dialami pemerintah daerah pada anggaran DAU belum dikelola secara maksimal. Lebih banyak digunakan untuk membiayai pegawai, perlu dilakukan perhitungan kembali porsi yang harus diberikan untuk membayar pegawai dan porsi untuk kebutuhan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
2. Untuk penelitian selanjutnya, bagi peneliti yang akan menggunakan topik yang sama mengenai keuangan daerah diharapkan untuk menambah data tahun yang terbaru dan variabel yang lebih banyak ataupun mengganti pada variabel moderasinya. Tujuannya untuk dapat menggali informasi yang lebih dalam dari faktor pertumbuhan ekonomi mempengaruhi porsi alokasi anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: expert.
- Chanif Rizqiyati, H. D. (2019). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi* .
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Dr. AAN Jaelani, M. (2018). *Keuangan Publik (Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)*. Cirebon: CV. AKSARASATU.
- Dwi Saraswati, S. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Publik Universitas Pembangunan Panca Budi*.
- Erdi Adyatma, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank*.
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JIEP- Universitas Brawijaya*.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idaman Pinem, F. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*.
- Jaeni, G. A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

- Jaya Dwiranda, I. P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Permoderasi. *Jurnal Ekonomi, Universitas Udayana Bali*.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahardika, S. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Riset Ekonomi STIESIA*.
- Maman, E. N. (2014). *Ekonometrika Pendekatan Teori dan Terapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Maria. (2017). Determinan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, Vol. 1 No. 2.
- Mohklas, D. I. (2019). Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Journal of Managemen and Business*.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qānūn, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel*.
- Rasyd, M. (2016). *Pengantar Mikro Ekonometrika Dengan Aplikasi Program Stata*. Yogyakarta: TREND.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis (Pendekatan Pengembangan keahlian)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, H. A. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia*.
- Styaningrum, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Studi Akuntansi*.

- Styaningrum, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi UMS*.
- Sugiarthi, N. P. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Studi Ekonomi Universitas Udayana, Bali*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitati, Kualitatif, Dan R & D, Cet. Ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Verawaty, C. I. (2019). Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Modrating Pada Pemerintah Provinsi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Bina Darma* .
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia.